

BAB I

PENDAHULUAN

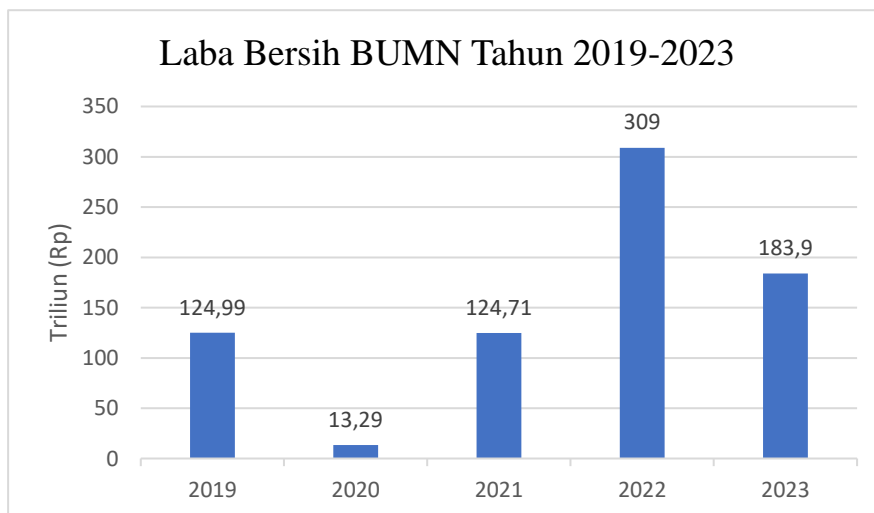
A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan dalam perusahaan merupakan sumber informasi yang penting. Laporan keuangan disusun untuk berbagi informasi internal perusahaan kepada pihak eksternal. Bidang ekonomi dan politik adalah area yang sering mengalami perubahan signifikan. Selain itu, laporan keuangan juga terpengaruh oleh dinamika ini dan memerlukan penyesuaian yang sesuai (Devi, 2022). Pada era digitalisasi ini, pelaporan digital memberi manfaat besar bagi penyusun dan pengguna informasi bisnis. Laporan keuangan menjadi lebih efisien, akurat, dan mudah diakses, memudahkan analisis dan pengambilan keputusan secara real-time (Nanjundaswamy, 2019). Dalam keuangan, keakuratan dan transparansi pelaporan keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa investor dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat keputusan yang tepat (Zadeh *et al.*, 2023).

Melalui pelaporan dan paublikasi laporan keuangan, masyarakat dan regulator dapat menilai transparansi operasi perusahaan negara serta penggunaan dana publik, memastikan integritas laporan keuangan lembaga tersebut (Ojuwa & Mwangi, 2023). Sebagai contoh dalam kasus perusahaan yang memanipulasi data keuangan masih tergolong cukup banyak. Hal ini menjadi bukti sulitnya menjamin kebenaran laporan

keuangan. Memberikan image yang baik di mata penanam modal tentunya banyak perusahaan yang memberikan informasi keuangan yang berintegritas rendah sehingga menyebabkan laporan yang diberikan menjadi menyesatkan dan menurunkan keakuratan. Kasus manipulasi data sering terjadi pada sebuah perusahaan yang disebabkan adanya tekanan atau peluang yang muncul pada perusahaan tersebut. Maka dari itu, pentingnya sebuah laporan keuangan untuk mengetahui dan memberikan gambaran yang akurat dan transparan tentang keadaan keuangan di setiap perusahaan yang dimana dapat membangun kepercayaan pemegang saham, investor, dan pihak terkait lainnya (Verawaty & Robika, 2023).

Dalam perusahaan dapat terjadi manipulasi data laporan keuangan disebabkan oleh kurangnya pengendalian internal dari pihak manajemen perusahaan. Dengan laba yang tinggi menjadi peluang suatu perusahaan dapat terjadinya manipulasi data laporan keuangan. Laba suatu perusahaan tinggi dipengaruhi oleh faktor pendukung dari peningkatan target yang didasari beberapa faktor, seperti meningkatnya harga komoditas global yang menguntungkan BUMN di sektor energi dan pertambangan. Pada tahun 2019 sampai 2023 laba perusahaan dapat dilihat dengan grafik, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Grafik Laba Bersih BUMN Tahun 2019-2023

Sumber: *data.goodstats.id*

Pendapatan dari instansi BUMN harus diperbaiki agar tidak hanya terfokus pada profit. Pada tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi covid-19 laba bersih BUMN mencapai angka Rp 124,99 triliun, dan di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dengan mencapai angka Rp 13,29 triliun akibat terjadinya pandemi covid-19 yang menghentikan kegiatan perputaran roda perekonomian Indonesia. Pada tahun 2021, BUMN mencatat laba bersih sebesar Rp 124,71 triliun karena perekonomian Indonesia mulai bangkit di tahun tersebut setelah terjadinya pandemi covid-19. Hal ini terjadi peningkatan sekitar 828,2% dibandingkan dengan tahun 2020. Melihat laba bersih BUMN di tahun 2022, dimana tahun ini adalah tahun dengan nilai laba bersih tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai Rp 309 triliun. Berdasarkan catatan BUMN pada tahun 2023 kuartal I, BUMN mendapatkan laba bersih sebesar Rp 183,9 triliun. Sementara itu,

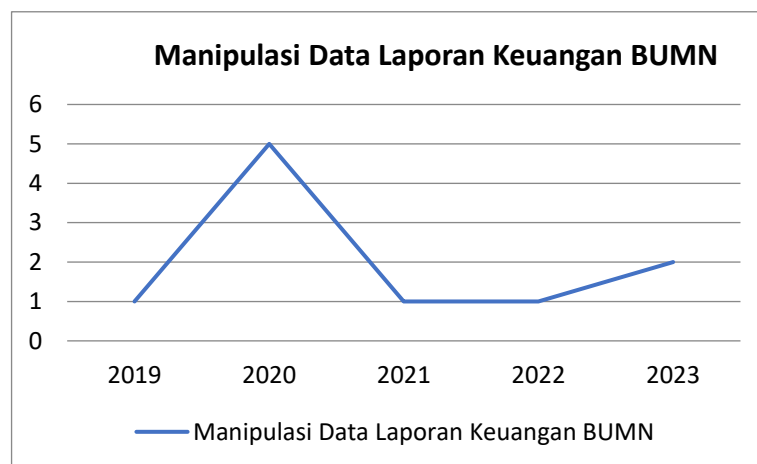
kementerian BUMN memasang target laba BUMN pada tahun 2024 sebesar Rp 2,434 triliun.

Dalam sebuah perusahaan jika tidak memiliki laporan keuangan akan banyak kasus terjadi di setiap perusahaan dan terjadi kendala keuangan yang harus dihadapi. Salah satu contoh skandal di mancanegara yaitu Skandal British Telecom yang memanipulasi laporan keuangan. British Telecom diduga menjadi *fraud* dengan meningkatkan pendapatan perusahaan dengan pembaruan *fake contract*, faktur palsu, dan transaksi palsu dengan pemasok. Dugaan penipuan ini telah berlangsung sejak tahun 2013. Akibatnya, laba melonjak sehingga British Telecom harus mengeluarkan 530 juta pounds dan memotong perkiraan *cash flow* sebesar 500 juta pounds untuk melunasi utangnya (Masnar *et al.*, 2023).

Salah satu kasus di dalam negeri juga mengenai manipulasi data akuntansi yang melibatkan perusahaan BUMN adalah Jiwasraya. Badan Pengawasan Keuangan (BPK) telah mengeluarkan penjelasan resmi mengenai kasus Jiwasraya. Salah satunya adalah kesalahan pengumuman profit perusahaan sejak tahun 2006 akibat dari rekayasa akuntansi (*window dressing*). Rekayasa akuntansi dilakukan dengan menyampaikan laporan keuangan yang wajar kepada Otoritas Pengawasan Lembaga Keuangan dan Pasar Modal (Bapepam LK), sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun pada kenyataannya, tahun 2018 Jiwasraya membutuhkan dana sebesar 32,89 triliun rupiah untuk kembali sehat. Sebab, harta kekayaan

perseroan yang tercatat hanya 23,26 triliun rupiah, sedangkan utangnya 50,5 triliun rupiah. Imbasnya, modal Jiwasraya minus 27,24 triliun rupiah. Selain itu, utang dan permasalahan produk JS *savings plan* tercatat sebesar 15,57 triliun rupiah. Laporan dari Kementerian Negara, sebagian besar dana Jiwasraya ditanam di saham-saham yang telah direkayasa. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak gagal bayar yang dilaporkan Asuransi Jiwasraya.

Tidak hanya pada satu perusahaan saja terjadi manipulasi data laporan keuangan. Pada tahun 2019 sampai 2023 terdapat banyak kasus manipulasi data dapat dilihat dengan grafik, sebagai berikut:



Gambar 1.2 Grafik Manipulasi Data Laporan Keuangan

Sumber: cnbcindonesia.com

Data yang ada pada grafik diatas merupakan keseluruhan dari tahun 2019 sampai 2023 yang mengalami manipulasi data laporan keuangan pada perusahaan BUMN. Di tahun 2019 terdapat perusahaan PT Garuda Indonesia yang mengalami manipulasi data pada perusahaannya. Pada tahun 2020 ada perusahaan PT Jiwasraya, PT Asabri, PT Garuda

Indonesia, PT Krakatau, dan PT Antam Tbk yang sedang mengalami manipulasi data laporan keuangan yang melonjak tinggi kasusnya pada perusahaan BUMN. Pada tahun 2021 sampai 2022 hanya terdapat perusahaan PT Kimia Farma dan PT KAI yang mengalami kasus tersebut. Namun, di tahun 2023 melonjak tinggi lagi dengan adanya kasus dari PT Waskita Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk. Dari berbagai kasus tersebut pentingnya untuk meningkatkan integritas laporan keuangan yang dimana merupakan dasar keputusan bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan. Sehingga, hal tersebut berdampak pada keberlanjutan perusahaan atau dapat berdampak pada integritas laporan keuangan. Jika tidak dicegah akan membuat merusak kepercayaan publik terhadap perusahaan serta industri secara keseluruhan. Dalam konteks integritas laporan keuangan mengacu pada kejujuran, keandalan, dan akurasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebuah perusahaan.

Terjadinya penyimpangan perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan akan memicu keraguan terhadap tata kelola perusahaan. Maka dari itu, untuk memperkuat praktik tata kelola perusahaan dapat membentuk *whistleblowing system* (sistem pelaporan). Sistem pelaporan ini bagian dari sistem internal control perusahaan yang dapat menghindari kegiatan penyelewengan dan ketidakjujuran serta menguatkan penerapan praktik tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, sistem pelaporan yang diterapkan dengan baik oleh perusahaan akan memperkuat komisar

independen dan komite audit untuk mencegah kemungkinan pelanggaran dan penipuan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan serta menjamin integritas laporan keuangan. Sehingga diharapkan dalam penelitian ini dengan perusahaan dan periode yang berbeda dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan *whistleblowing system* sebagai variabel moderasi dan variabel lainnya dalam penelitian ini dapat berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan dalam penelitian ini mencakup komisaris independen. Jumlah komisaris independen, atau komisaris dari luar korporasi memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemegang saham dan manajemen, komisaris independen akan bertindak sebagai perantara. Setiap tindakan yang diambil oleh manajemen akan dilaporkan kepada pemegang saham, membuat manajemen lebih berhati-hati dengan menentukan pilihannya. Pemegang saham dapat memeriksa sinyal laporan menggunakan hasil laporan (Maychandra & Nelvirita, 2023).

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan dalam penelitian ini mencakup komite audit. Komite audit yang anggotanya dipilih oleh dewan komisaris bertanggung jawab atas pelaporan keuangan. Komite audit terdiri dari anggota terpilih dari dewan direksi, klien, atau komisaris profesional. Peran mereka adalah dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan mengurangi perilaku

manajerial yang oportunistik (Wilson, 2023). Selain itu, komite audit berkualitas tinggi diharapkan diperlukan untuk mengurangi risiko atas audit yang buruk (An, 2023). Bisnis public harus memiliki komite audit. Komite audit bertugas melakukan pemeriksaan dan penyelidikan yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan tugas direksi dalam pengelolaan perusahaan yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris perusahaan (Masnar *et al.*, 2023).

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan research gap oleh penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Menurut (Maychandra & Nelvirita, 2023), dan (Fitrianingsih *et al.* 2023) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan menurut Sonia & Nazir (2022) komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Selanjutnya penelitian mengenai komite audit terhadap integritas laporan keuangan, oleh beberapa peneliti terdahulu yaitu penelitian (Indira Junita, 2023), Sembiring *et al.* (2022) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian oleh (Herlambang & Nurbaiti, 2023) bahwa komite audit tidak mempengaruhi kepada integritas laporan keuangan.

Motivasi untuk melakukan penelitian ini muncul karena adanya *research gap* dari penelitian sebelumnya serta fenomena manipulasi

laporan keuangan yang menjadi perhatian, seperti kasus manipulasi laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Dengan merujuk pada kasus tersebut dan variasi temuan dari penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengusung penelitian berjudul: **“Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan Dengan *Whistleblowing System* Sebagai Moderasi”**. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap integritas laporan akhir dengan *whistleblowing system* sebagai moderasi dan populasi yang akan diteliti pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Periode pengamatan penelitian ini adalah tahun 2019-2023
3. Penelitian ini dibatasi dengan pembahasan mengenai pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap integritas laporan keuangan dengan *whistleblowing system* sebagai variabel moderasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
3. Apakah *whistleblowing system* dapat memoderasi komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan?
4. Apakah *whistleblowing system* dapat memoderasi komite audit terhadap integritas laporan keuangan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan
3. Untuk menguji secara empiris *whistleblowing system* terhadap komisaris independen dengan integritas laporan keuangan
4. Untuk menguji secara empiris *whistleblowing system* terhadap komite audit dengan integritas laporan keuangan

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian diharapkan dapat menghasilkan ide dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang konsep dan tanggung jawab komisaris independen dan komite audit terutama terkait dengan laporan keuangan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya untuk mengkaji tentang integritas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana komisaris independen dan komite audit agar bisa meningkatkan integritas laporan keuangan perusahaan tersebut.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan.